



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/22 /423.011/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH
KOTA PASURUAN TAHUN 2024

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Pasuruan, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pasuruan.
- KETIGA : Pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib disampaikan dalam bentuk laporan kepada Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/22 /423.011/2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2024

NO	AREA PENGAWASAN	TINGKAT RISKO	JENIS PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN (Sesuai Permenagri 19 Tahun 2023)	RUANG LINGKUP	IRIGAN WILAYAH	JADWAL		BIAYA (Rp)	HARI PENGAWASAN				OUTPUT LAPORAN	SARANA PRASARANA	
							RPL	RMP		Pemanggujawab	Wakil Penanggungjawab	Ketua Tim	Anggota Tim			Jumlah
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	PENGAWASAN ISU STRATEGIS															
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Tinggi	Audit Ketepatan/Audit Tujuan Tertentu 3	Menilai ketepatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketepatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	DPU/PR	1			44.228.000	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tinggi	Audit Ketepatan/Audit Tujuan Tertentu 3	Menilai ketepatan program terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketepatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah	DPU/PR	2			44.228.000	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tinggi	Audit Ketepatan/Audit Tujuan Tertentu 3	Menilai ketepatan program terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketepatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah	Sekretariat DPRD	3			44.228.000	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
4	Program Pengelolaan Kelembagaan, Hayati (KEHATI)	Tinggi	Audit Kinerja 1	Menilai kinerja suatu program atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	1			86.558.800	1	3	10	30	44		Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tinggi/Sedang	Audit kinerja 2	Menilai kinerja suatu program atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Dinas Kesehatan, RSUD	2			86.558.800	1	3	10	30	44	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Sedang	Audit kinerja 3	Menilai kinerja suatu program atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	DIKERUD	3			86.558.800	1	3	10	30	44	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Monitoring dan Evaluasi atas Pilkada.	Tinggi	Monitoring		Menilai ketepatan penyelenggaraan pemilu pada aspek anggaran pemilu, kebijakan daerah, maupun kepegawaian	Bakcsbangpol	1			44.228.000	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
8	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah	Sedang	Monitoring		Menilai ketepatan pengendalian inflasi daerah dari aspek kebijakan maupun kebutuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi		1			9.022.600	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
9	Revisi P3DN TW I	Sedang	Revisi				1			9.022.600	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
10	Revisi P3DN TW II	Sedang	Revisi				1			9.022.600	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
11	Revisi P3DN TW III	Sedang	Revisi				1			9.022.600	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
12	Revisi P3DN TW IV	Sedang	Revisi				1			9.022.600	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
B. AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																	
1	Revisi RKA 2025	Sedang	Revisi		Memastikan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)		1	IX.4	IX.4	86.558.800	1	3	6	18	28	11	
2	Revisi LKOPD 2023	Sedang	Revisi		Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Seluruh perangkat daerah	1	III.1	III.1	36.310.800	1	3	6	18	28	11	
3	Revisi RKA Perubahan 2024	Sedang	Revisi		Memastikan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)		1	VIII.4	IX.1	86.558.800	1	3	6	18	28	11	
4	Probit Audit	Tinggi	Audit		Memastikan kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	5 Provek Strategis terpilih	1	III.1	III.1	44.228.000	1	3	6	18	28	2	
5	Revisi Laporan Kinerja (LKIP)	Sedang	Revisi		Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.		1	III.1	III.1	21.256.000	1	3	6	18	28		
6	Revisi SHS	Sedang	Revisi		Memastikan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.		1			9.022.600	1	3	6	18	28	1	
7	Revisi HSPK	Sedang	Revisi		Memastikan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.		1			9.022.600	1	3	6	18	28	1	
8	Revisi DAK Tahap I	Sedang	Revisi		Memastikan akurasi pengalokasian dan penyaluran Dana Abkasi		1	X.1	X.1	9.022.600	1	3	6	18	28	1	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Revisi DAK Tahap II	Sedang	Revisi	Memingkatkan akurasi pengalokasian dan kepastian waktu penyaluran Dana Alokasi		1	XII.2 XII.2	XII.2	9.022.600	1	3	6	18	28	1	
10	Revisi DAK Tahap III (2023)	Sedang	Revisi	Memingkatkan akurasi pengalokasian dan kepastian waktu penyaluran Dana Alokasi		1	VII.2 VII.2	VII.2	9.022.600	1	3	6	18	28	1	
11	Revisi Gaji P3K 2024 (DAU Khusus)	Sedang	Revisi	Memingkatkan akurabilitas pengelolaan belanja daerah.		1	I.1 XII.4	XII.4	9.022.600	1	3	6	18	28	1	
12	Opname Kas dan Persediaan	Sedang	Evaluasi	Memingkatkan kualitas pengelolaan kas dan persediaan.		1	I.1 I.4	I.4	36.310.800	1	3	6	18	28	11	
13	Penjaminan Kualitas SPIP	Sedang	Evaluasi	Memingkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).	Seluruh perangkat daerah	1	VII.1 VII.4	VII.4	124.627.300	1	3	6	18	28	11	
14	Evaluasi SAKIP OPD	Sedang	Evaluasi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.		1	IV.1 IV.4	IV.4	86.558.800	1	3	6	18	28	11	
15	Fasilitasi Penerapan MK	Sedang	Consulting	Memingkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).		1	VI.1 VI.4	VI.4	124.627.300	1	3	6	18	28	11	
16	Pemantauan TLIP (Internal dan Eksternal)	Sedang	Pengawasan Lain	Capaian tidak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Seluruh perangkat daerah	1	I.1 XII.4	XII.4	34.293.400	1	3	6	18	28	2	
17	Revisi RAKPD 2025	Sedang	Revisi	Memingkatkan kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		2	VI.1 VI.2	VI.2	86.558.800	1	3	7	21	32	1	
18	Revisi RAKPD Perubahan 2024	Sedang	Revisi	Memingkatkan kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		2	VII.1 VII.2	VII.2	86.558.800	1	3	7	21	32	1	
19	Revisi RKA 2025	Sedang	Revisi	Memingkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)		2	IX.3 IX.4	IX.4	86.558.800	1	3	7	21	32	10	
20	Revisi RKA Perubahan 2024	Sedang	Revisi	Memingkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)		2	VIII.4 IX.1	IX.1	86.558.800	1	3	7	21	32	10	
21	Revisi LK OPD 2023	Sedang	Revisi	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Seluruh perangkat daerah	2	II.1 II.4	II.4	36.310.800	1	3	7	21	32	10	
22	Probiti Audit	Tinggi	Audit	Memingkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	5 Procek Strategis terpilih	2			44.228.000	1	3	7	21	32	2	
23	Revisi Laporan Kinerja (LKIP)	Sedang	Revisi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.		2	III.3 IV.2	IV.2	86.558.800	1	3	7	21	32	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	Revisi ASB	Sedang	Revisi	Memingkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	2	VI.2	VI.4	9.022.600	1	3	7	21	32	1			
25	Revisi DAK Tahap I	Sedang	Revisi	Memingkatkan akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi	2	X.1	X.1	9.022.600	1	3	7	21	32	1			
26	Revisi DAK Tahap II	Sedang	Revisi	Memingkatkan akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi	2	XII.2	XII.2	9.022.600	1	3	7	21	32	1			
27	Revisi DAK Tahap III (2023)	Sedang	Revisi	Memingkatkan akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi	2	VII.2	VIII.1	9.022.600	1	3	7	21	32	1			
28	Revisi Gaji P3K 2024 (DAU Khusus)	Sedang	Revisi	Memingkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	2	I.1	XII.4	9.022.600	1	3	7	21	32	1			
29	Opname Kas dan Persediaan	Sedang	Evaluasi	Memingkatkan kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	2	I.1	I.IV	36.310.800	1	3	7	21	32	10			
30	Penjaminan Kualitas SIPP	Sedang	Evaluasi	Memingkatkan nilai matutans Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP).	2	VII.1	VII.4	124.627.300	1	3	7	21	32	10			
31	Evaluasi SAKIP OPD	Sedang	Evaluasi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	2	IV.1	IV.4	86.558.800	1	3	7	21	32	10			
32	Fasilitasi Penerapan MR	Sedang	Consulting	Memingkatkan nilai matutans Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP).	2	VI.1	VI.4	124.627.300	1	3	7	21	32				
33	Pemantauan TILHP (Internal dan Eksternal)	Sedang	Pengawasan Lain	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	2	I.1	XII.4	34.293.400	1	3	7	21	32	1			
34	Revisi KUA, PPAS Perubahan 2024	Sedang	Revisi	Memingkatkan kualitas Anggaran dan Prioritas Phadon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	3	VII.3	VIII.1	86.558.800	1	3	7	21	32	1			
35	Revisi RKA 2025	Sedang	Revisi	Memingkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	3	VIII.3	VIII.4	86.558.800	1	3	7	21	32	10			
36	Revisi RKA Perubahan 2024	Sedang	Revisi	Memingkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	3	VIII.4	IX.1	86.558.800	1	3	7	21	32	10			
37	Revisi LK OPD 2023	Sedang	Revisi	Tersedia laporan keuangan yang memadai susun kandah akuntansi pemerintah.	3	II.1	II.4	36.310.800	1	3	7	21	32	10			

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	Revisi LKPD 2023	Sedang	Revisi	Tersedia laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Seluruh perangkat daerah	3	III.1	III.4	36.310.800	1	3	7	21	32	1	
39	Probitas Audit	Tinggi	Audit	Memungkinkan kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	5 Proyek Strategis terpilih	3	VII.1	XII.4	44.228.000	1	3	7	21	32	1	
40	Revisi Laporan Kinerja (LKjIP)	Sedang	Revisi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.		3	III.3	IV.2	21.256.600	1	3	7	21	32	10	
41	Monrev BOS	Sedang	Monitoring & Evaluasi	Memungkinkannya akuntabilitas pengeluaran belanja daerah.		3	I.1	XII.4	9.022.600	1	3	7	21	32	1	
42	Revisi DAK Tahap I	Sedang	Revisi	Memungkinkannya akurasi pengelompokan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi		3	X.1	X.1	9.022.600	1	3	7	21	32	1	
43	Revisi DAK Tahap II	Sedang	Revisi	Memungkinkannya akurasi pengelompokan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi		3	XII.2	XII.2	9.022.600	1	3	7	21	32	1	
44	Revisi DAK Tahap III (2023)	Sedang	Revisi	Memungkinkannya akurasi pengelompokan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi		3	VII.2	VIII.1	9.022.600	1	3	7	21	32	1	
45	Revisi Penyerapan Anggaran dan Penyerapan PBJ	Sedang	Revisi	Memungkinkannya akuntabilitas pengeluaran belanja daerah.		3	I.1	XII.4	9.022.600	1	3	7	21	32	4	
46	Revisi Gaji P3K 2024 (DAU Khusus)	Sedang	Revisi	Memungkinkannya akuntabilitas pengeluaran belanja daerah.		3	I.1	XII.4	9.022.600	1	3	7	21	32	1	
47	Revisi SIL-PA BOS	Sedang	Revisi	Memungkinkannya akuntabilitas pengeluaran belanja daerah.		3	II.2	II.2	9.022.600	1	3	7	21	32	1	
48	Opname Kas dan Persediaan	Sedang	Evaluasi	Memungkinkan kualitas pengelolaan kas dan persediaan.		3	I.1	I.4	36.310.800	1	3	7	21	32	10	
49	Penjaminan Kualitas SIPP	Sedang	Evaluasi	Memungkinkannya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Seluruh perangkat daerah	3	VII.1	VII.4	124.627.300	1	3	7	21	32	10	
50	Evaluasi SAKIP OPD	Sedang	Evaluasi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Seluruh perangkat daerah	3	IV.1	IV.4	124.627.300	1	3	7	21	32	10	
51	Fasilitas Penerapan MR	Sedang	Consulting	Memungkinkannya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).		3	VI.1	VI.4	124.627.300	1	3	7	21	32	1	
52	Revisi Hibah Partpol	Sedang	Revisi	Memungkinkannya akuntabilitas pengeluaran belanja daerah untuk Pemilu.	Bakresbangpol	3	V.2	V.2	44.228.000	1	3	7	21	32	1	
53	Penataan TLLIP (Internal dan Eksternal)	Sedang	Pengawasan Lain	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	Seluruh perangkat daerah	3	I.1	XII.4	34.293.400	1	3	7	21	32	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C	PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH																
1	Monitoring dan Evaluasi capaian MCP KPK Semester 2 Tahun 2023	Sedang	Pengawasan Lain		Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.		4	1.1	1.2	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
2	Sosialisasi Whistleblowing System di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan	Sedang	Pengawasan Lain		Optimasi pembangunan reformasi birokrasi.		4			33.877.200	1	3	7	21	32	1	
3	Sosialisasi Perilaku Anti Korupsi (Blappelibangsa dan BPKA)	Sedang	Pengawasan Lain		Terselenggaranya pelaporan LHKPN dan LHKASN.		4			160.120.400	1	3	7	21	32	1	
4	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (On-Gong) Trwulan IV Tahun Monitoring Pelaporan LHKAN Tahun 2024	Sedang	Evaluasi		Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.		4	1.3	1.4	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
5	Birokrasi Tahap Pelaksanaan (On-Gong) Trwulan IV Tahun Monitoring Pelaporan LHKAN Tahun 2024	Sedang	Monitoring		Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.		4	11.1	11.4	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
6	Pennataan TLIP (Internal dan Eksternal)	Sedang	Monitoring & Evaluasi		Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.		4			34.293.400	1	3	7	21	32	1	
7	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Sedang	Monitoring & Evaluasi		Optimasi pembangunan reformasi birokrasi.		4	V.4	VI.2	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
8	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Perencanaan (Ex-Ante) Tahun 2024	Sedang	Evaluasi		Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.		4			50.817.700	1	3	7	21	32	1	
9	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (On-Gong) Trwulan I Tahun	Sedang	Evaluasi		Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.		4	IV.1	IV.4	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
10	Monitoring dan Evaluasi capaian MCP KPK TW 1 dan TW 2 Tahun 2024	Sedang	Monitoring & Evaluasi		Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.		4	VI.3	VII.1	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
11	Pengumpulan Data Responden Survei Pendataan Integritas populasi Internal, Eksternal, dan Ekspesr oleh KPK RI Tahun 2024	Sedang	Pengawasan Lain		Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).		4	IV.1	VI.1	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
12	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tinggi	Audit		Merilai program yang bersiko tinggi pada aspek temuan oleh APJP dan eksternal		4	1.1	XU.4	44.228.000	1	3	7	21	32	1	
13	Revisi Tata Kelola BMD (sebagai upaya Tindak Lanjut MCP KPK 2024)	Sedang	Revisi		Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.		4	VIII.2	VIII.3	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
14	Revisi Tata Kelola Pajak Daerah (sebagai upaya Tindak Lanjut MCP KPK 2024)	Sedang	Revisi		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.		4	IX.4	X.1	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
15	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (On-Gong) Trwulan II Tahun	Sedang	Evaluasi		Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.		4	VII.2	VII.3	50.817.700	1	3	7	21	32	1	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Revisi Manajemen ASN (sebagai upaya tindak lanjut MCP KPK 2024)	Sedang	Revisi	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.		4	XII.2 XII.3	XII.3	50.817.700	1	3	7	21	32		
17	Revisi Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan (sebagai upaya Tindak Lanjut MCP KPK 2024)	Sedang	Revisi	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi		4	VII.4 VIII.1	VIII.1	50.817.700	1	3	7	21	32		
18	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (On-Gong) Triwulan III Tahun 2024	Sedang	Evaluasi	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi		4	X.2 X.3	X.3	50.817.700	1	3	7	21	32		
19	Revisi Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (sebagai upaya Tindak lanjut MCP KPK 2024)	Tinggi	Revisi	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi		4	XI.1 XI.2	XI.2	50.817.700	1	3	7	21	32		
20	Telaah Pengadaan	Tinggi	Pengawasan Lain	Meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan masyarakat.		4	I.1 XII.4	XII.4	44.238.000	1	3	7	21	32	1	
21	Revisi Pelayanan Publik Tahun 2024	Sedang	Revisi	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).		4	IX.1 IX.3	IX.3	21.256.600	1	3	7	21	32		
22	Monitoring dan Evaluasi capaian MCP KPK Triwulan III Tahun 2024	Sedang	Monitoring & Evaluasi	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.		4	X.4 XI.1	XI.1	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
23	Monitoring dan Evaluasi capaian MCP KPK Triwulan IV Tahun 2024	Sedang	Monitoring & Evaluasi	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.		4	XII.4 XII.4	XII.4	50.817.700	1	3	7	21	32	1	
24	Revisi Pengelolaan Dana Bansos Tahun 2024	Sedang	Revisi	Meningkatnya akurabilita pelayanan dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.		4	XI.3 XI.4	XI.4	9.022.600	1	3	7	21	32	1	
25	Revisi Pengelolaan Bantuan Keuangan Tahun 2024	Sedang	Revisi	Meningkatnya akurabilita pelayanan dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.		4	XI.4 XII.1	XII.1	9.022.600	1	3	7	21	32	1	
26	Pendampingan Penyusunan Identifikasi dan Datar Risiko Kecurangan	Sedang	Consulting	OPD bersiko tinggi dalam PPIER		4	X.2 XI.3	XI.3	124.627.300	1	3	7	21	32	1	
D	KAPABILITAS AFIP													0		
1	Penilaian Mandiri Kapabilitas AFIP	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Internal	4	V.1 V.4	V.4	124.627.300	1	3	7	21	32	1	
2	Telaah Sejawat Intern (Peer Review)	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Internal	1,2,3,4			124.627.300	1	3	5	15	24	4	
3	Diklat peningkatan kompetensi Tahap 1	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Internal	1,2,3,4	XI.1 XI.4	XI.4	#####	1	5	23	115	144	1	
4	Diklat peningkatan kompetensi Tahap 2	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Internal	1,2,3,4	IV.1 IV.1	IV.1	#####	1	5	23	115	144	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Diklat peningkatan kompetensi Tahap 3	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Internal	1.2.3.4	VII.1.VII.1	*****	1	5	23	115	144				
	Total																

